BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Berdirinya Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Bandung.

Bila sebuah negara yang baru merdeka dan berdaulat, ketentuan tentang pengurusan keuangan negara tentu saja belum dapat berjalan dan memadai, begitu juga dengan keadaan Indonesia saat itu, oleh sebab itu setelah 2 (dua) hari berkongres di Solo tepatnya pada tanggal 29 september 1945, Menteri Keuangan Mr.A.A Maramis mengeluarkan dekrit dengan 3 (tiga) keputusan penting :

1. Tidak mengakui hak dan wewenang pejabat pemerintah tentara Jepang untuk menerbitkan dan menandatangani surat-surat perintah membayar uang dan lain-lain, dokumen yang berhubungan dengan pengeluaran negara.
2. Terhitung 29 september 1945, hak dan wewenang pejabat pemerintah tentara Jepang diserahkan kepada pembantu bendahara negara yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
3. Kantor-kantor kas dan nama-nama intansi yang melakukan tugas keuangan negara (kantor pos), harus menolak pembayaran atau surat-surat perintah membayar uang yang ditandatangai oleh pembantu bendahara negara atau pegawai negeri yang ditunjuk.

Dengan adanya dekrit tersebut berakhirlah masa " *Nempo Gun Gunsei Kaikei Kitei*" (peraturan perbendaharaan pemerintah bala tentara angkatan darat di daerah selatan), dan memulai babak baru pengurusan keuangan negara merdeka.

Susunan pertama organisasai kementerian keuangan terdiri dari 5 (lima) jabataan setiap jabatan kecuali resi candu dan garam serta pegadaian membawahi 3 (tiga) urusan. Kelima jabatan tersebut masing-masing adalah :

1. Jabatan umum membawahi urusan :
    a. Kepegawaian
    b. Perbendaharaan
    c. Umum dan Rumah Tangga
2. Jabatan keuangan membawahi urusan :
    a. Anggaran Negara
    b. Perbendaharan dan Kas
    c. Uang, Bank dan Kredit
3. Jabatan Pajak membawahi Urusan
    a. Perpajakan
    b. Bea dan Cukai
    c. Pajak Bumi
4. Jabatan Resi Candu dan Garam
5. Jabatan Pegadaian

Dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan, Presiden menunjuk Menteri Keuangan sebagai Bendahara Negara, dan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut ditunjuk pula penbantu Bendahara Negara yang mempunyai kewenangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU).

Bersama dengan terbentuknya negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tanggal 17 Agustus 1945 di bidang keuangan negara, pemerintah telah

menggabungkan urusan bendahara negara dengan jabatan perbendaharaan dan kas negara, sehingga pada waktu itu lahirlah kantor seperti:

1. Kantor pusat perbendaharaan
2. Kantor pengawas kas negara
3. Kantor kas negara.

Berdasarkan surat keputusan Menteri urusan pendapatan, pembiayaan dan pengawasan Republik Indonesia tanggal 28 Desember 1964 No. : PKN/1/6/4 ditetapkan bahwa terhitung 1 Januari 1965, Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,Kantor pengawas Kas Negara Diintegrasikan menjadi Kantor Bendahara Negara.

Dengan demikian Kantor Bendahara Negara Bandung sejak tanggal 1 Januari 1965 mempunyai tugas-tugas yang meliputi ketiga tugas gabungan kantor tersebut diatas.Yaitu :

1. Bidang Pendapatan
2. Bidang Pembiayaan
3. Bidang Pengawasan Keuangan Negara.

Sejalan dengan kebutuhan, maka pada tahun 1968 Kantor Pusat Pembayaran Pensiun (KP3) di Bandung di-intregrasikan kedalam Kantor Bendahara Negara menurut daerah dimana para penerima pensiun termasuk kedalam satu wilayah pembayaran bendahara Negara.

Kemudian pada tahun 1970 Direktorat Perjalanan digabungkan kedalam Direktorat Perbendaharan Negara sehingga demikian maka kantor-kantor perjalanan didaerah harus pula digabungkan kedalam Kantor Bendahara Negara.

Kantor Bendahara merupakan gabungan dari 5 (lima) kantor, yaitu :

1. Kantor Pusat Perbendaharan Negara
2. Kantor Pengawas Kas Negara
3. Kantor Kas Negara
4. Kantor Pusat Pembayaraaan Pensiun
5. Kantor Pusat Perjalanan

Berhubung dengan adanya pelaksanaan reorganisasi pada seluruh departemen yang ada berdasarkan keputusan presiden No: 54 tahun 1974 tentang pokok organisasi departemen, maka pelaksanaan penyusunan organisasi pada departemen keuangan dilaksanakan dengan berpedoman pada keputusan menteri keuangan tanggal 16 april 1975 No. 405/mk/6/4/75 tentang susunan organisasi dan tata kerja departemen keuangan.

Dengan adanya reorganisasi seluruh departemen, maka pada tahun 1975 kantor bendahara di pecah menjadi 2 (dua) kantor, yaitu:

1. Kantor Perbendaharaan Negara (KPN)
2. Kantor Kas Negara (KKN)

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Organisasi adalah keseluruhan dari pada sumber-sumber yang telah tersedia baik sumber yang bersifat manusia maupun non manusia, serta merupakan gambaran dari wewenang dan tanggung jawab dalam suatu organisasi termasuk di dalamnya bagian daripada organisasi tersebut.

Maksud disusunnya organisasi karena pimpinan perusahaan menyadari bahwa masalah-masalah yang dihadapi perusahaan sangatlah komplek, sehingga tidak mungkin lagi hanya pimpinan yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Baik ditinjau dari segi volume pekerjaan maupun di tinjau dari keterbatasan waktu yang tersedia.



Struktur organisasi yang tepat bagi perusahaan belum tentu baik bagi perusahaan lainnya. Implementasi bentuk struktur organisasi ini sangat di pengaruhi oleh jenis perusahaan. Luas, skala perusahaan dan lain-lain. Struktur organisasi menggambarkan posisi manajemen, tingkat wewenang, kewajiban dan tanggung jawab serta beberapa hubungan yang relatif tetap dan mantap antara pekerjaan dan kelompok pekerjaan. Tujuan utamanya adalah untuk mengkoordinasikan kegiatan seluruh organisasi untuk mencapai tujuan bersama secara efektif.

Jadi dengan adanya struktur organisasi dapat dilihat dengan jelas hubungan kerja keras, wewenang dan tanggung jawab dari tiap – tiap bagian yang turut mengambil bagian dalam organisasi tersebut.

Secara umum struktur organisasi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Bandung tahun 2003 adalah sebagai berikut :

I. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Bandung

II. Kasabag Umum

- Korpel TU dan Keuangan
- Korpel RT dan Pelaporan
- Korpel Kepegawaian

III. Kasi Bank Tunggal

- Korpel A
- Korpel B
- Korpel C

IV. Kasi Bank Persepsi

- Korpel A
- Korpel B
- Korpel C

V. Kasi Perbendaharaan I

- Korpel I A
- Korpel I
- Korpel I C
- Korpel I D
- Korpel I E

VI. Kasi Perbendaharaan II

- Korpel II A
- Korpel II B
- Korpel II C
- Korpel II D
- Korpel II E

VII.Kasi Pendapatan

- Korpel A
- Korpel B

- Korpel C

2.3 Deskripsi Jabatan

Kepala Seksi

Fungsi yang dijalankan oleh kepala seksi disini adalah :

1. Melaksanakan sebagian tugas kepemimpinan dan koordinasi dalam bidang perbendaharaan.
2. Mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pengeluaran keuangan negara (APBN).
3. Melayani permintaan untuk pengeluaran belanja rutin dan pengeluaran untuk pelaksanaan pembangunan baik di instansi pusat maupun pelaksanaan pada otonomi daerah
4. Melaporkan laporan keuangan setiap bulannya kepada departemen yang mengawasi kinerja daripada bagian perbendaharaan.

Sedangkan wewenang yang di miliki oleh kepala seksi disini adalah:

1. Atas nama menteri keuangan kepala seksi bertindak sebagai koordinatur atau yang berwenang didalam mengambil tindakan-tindakan pengesahan terhadap terjadinya pengeluaran keuangan negara
2 Menyetujui atau menolak pengajuan SPM atau Surat Perintah membayar dari bendaharawan pada Instansi yang bersangkutan.

3 Memberi perintah atas nama pemerinah kepada bendaharawan umum kas negara untuk membayar tagihan yang di ajukan oleh bendaharawan yang berada pada instansi yang meminta seperti gaji rutin, proyek pusat, dan proyek daripada pemerintah daerah ataupun yang di ajukan oleh pihak ketiga atau perusahaanyang merupakan rekanan kerja daripada KPKN khususnya bagian perbendaharaan.

Koordinator Pelaksana

Fungsi yang dijalankan oleh koordinator pelaksana disini adalah :

1. Membantu sebagian tugas daripada kepala seksi sesuai dengan beban kerjanya di dalam mengkoordinir pelaksanaan tugas – tugas perbendaharaan.
2. Menyiapkan laporan keuangan setiap bulannya untuk nantinya diserahkan kepada kepala seksi.

Sedangkan wewenang yang di miliki oleh koordinator pelaksana disini adalah :

1. Menseleksi setiap permintaan pengeluaran keuangan negara dalam bentuk SPP yang di ajukan oleh bendaharawan pada Instansi yang meminta.
2. Mempertimbangkan kelayakan dari setiap berkas pengajuan SPP seperti di terangkan dalam struktur organisasi bahwa dibagian perbendaharaan terdapat lima orang koordinator pelaksana yang

membawahi beberapa bawahan . tapi pada inti nya fungsi dan wewenang daripada setiap korpel adalah sama yang membedakan hanya instansi yang dipegang oleh setiap korpel. karena perlu di ketahui bahwa setiap korpel memegang instansi yang berbeda-beda.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Aspek kegiatan pegawai yang ada di Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bandung masuk pada pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 16.00 wib. Sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu libur. Disiplin kerja ini diterapkan pada setiap pegawai dan karyawan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Serta dapat menyelesaikan segala tanggung jawab dan tugasnya tanpa ditunda dan tepat pada waktu yang ditentukan. Untuk mencapai apa yang diharapkan sesuai dengan tujuan diatas maka pihak instansi mengadakan tindakan pengawasan tindakan, pengawasan itu dapat berupa :

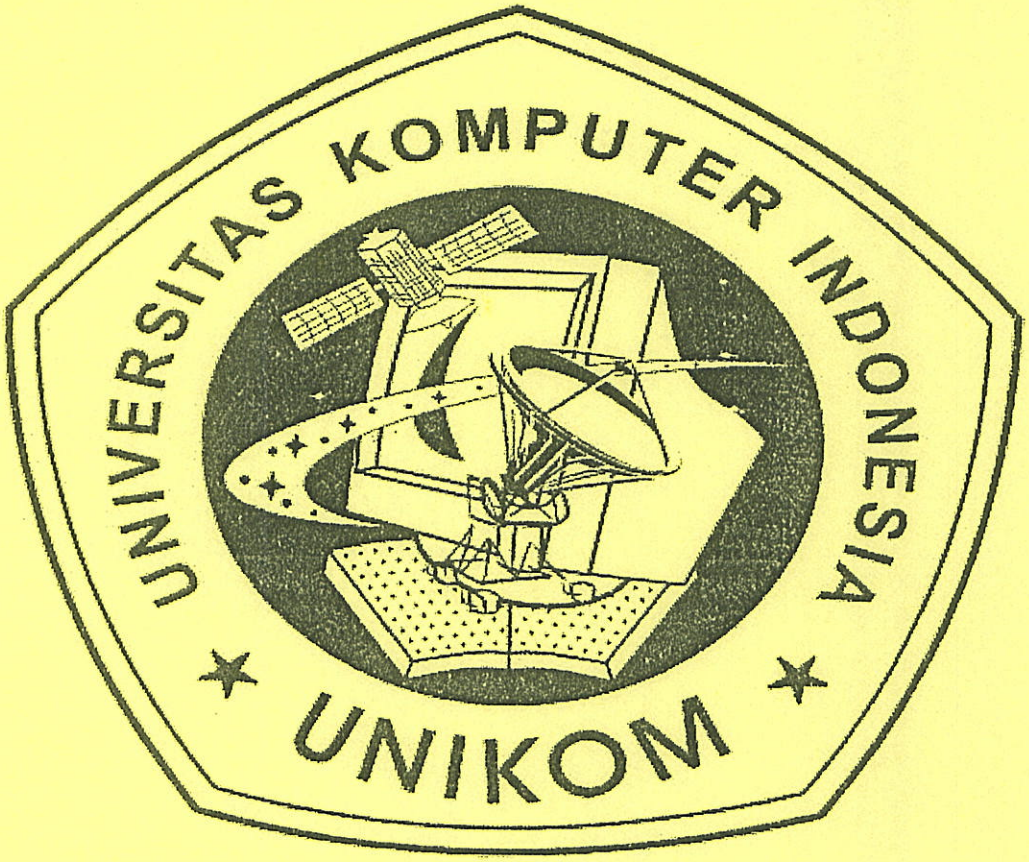
a. Pengawasan langsung di tempat kerja karyawan pada saat melaksanakan tugasnya.
b. Pengawasan pelaksanaan ini di lakukan oleh unsur-unsur tertentu bertugas di bidang pengawasan langsung oleh kepala bagian masing-masing.

Jenis disiplin kerja yang diterapkan pada instansi yang penulis tempati untuk berpraktek yaitu pada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bandung diantaranya :

1. Absensi pagi (masuk kantor)
2. Absensi siang (masuk setelah istirahat)
3. Absensi sore (pulang kantor)
4. Setiap hari sabtu dan minggu libur
5. Setiap hari rabu menggunakan seragam batik

Pada hakekatnya pemeliharaan kebersihan tempat kerja dan lingkungan merupakan kewajiban bagi seluruh karyawan dan karyawati di Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Bandung. Akan tetapi pada khusus nya tugas ini di kerjakan oleh pegawai lapangan (*cleaning service*) yang tugasnya membersihkan kantor dan sekitarnya.

Dalam masalah keamanan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas serta keamanan-keamanan lainnya di serahkan kepada satpam yang ada di Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Bandung.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM